PARTICIPATORY GOVERNANCE DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DESA SUNGGAL KANAN KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Dandi Satria Ramadhan Harahap
NPP. 29.0098
Asdaf Kota Medan ,Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Kebijakan Publik

Email: 29.0098@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on problems in the application of participatory governance in the process of formulating village development policies.* ***Objective****: The purpose of this study is to describe participatory governance in the development process in Sunggal Kanan Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency.* ***Methods:*** *This study uses descriptive qualitative research methods to provide a clear description of the problems studied in Sunggal Kanan Village and conduct interviews with several informants.* ***Results/Findings:*** *The findings on participatory governance in the process of formulating development policies in Sunggal Kanan Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency are known by using 3 considerations, namely collecting information on development problems, channeling community aspirations, and diversification of policy making. The collection of information on development issues is seen from the presence and activity of the community at the implementation of village deliberations in submitting suggestions and criticisms of development.* ***Conclusion :*** *The channeling of community aspirations is seen from the transparency carried out by the village government as a channel for community aspirations in improving development. Meanwhile, the diversity of policy making is seen from the differences in the decisions taken by the village government for each region in Sunggal Kanan Village according to the needs of the region.*

Keywords: Participatory Governance, Policy, Development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dalam penerapan pemerintahan partisipatif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa **Tujuan**: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemerintahan partisipatif dalam proses pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti di Desa Sunggal Kanan serta melakukan wawancara dengan beberapa informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh terhadap Pemerintahan partisipatif dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diketahui dengan menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan kebijakan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musyawarah desa dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan. **Kesimpulan:** Penyaluran aspirasi masyarakat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan diversivitas pengambilan kebijakan dilihat dari perbedaan keputusan yang diambil pemerintah desa untuk setiap wilayah di Desa Sunggal Kanan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Kata Kunci : Pemerintahan Paritisipatif, Kebijakan, Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan partisipatif adalah konsep pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai individu atau organisasi sosial sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik yang selama ini didominasi oleh pemerintah. Konsep *Participatory governance* menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima dan pelaksana dari suatu kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah akan tetapi masyarakat memiliki peran sebagai aktor dalam perumusan suatu kebijakan, dengan kata lain bahwa keterlibatan masyarakat di dalam proses perumusan suatu kebijakan sangatlah dibtuhkan agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat (kebijakan partisipatif).

Kebijakan partisipatif, yang pada dasarnya adalah penataan “bottom up”, dapat dengan tepat mencerminkan kepentingan masyarakat. Pemerintahan partisipatif merupakan strategi yang mengikutsertakan daerah setempat untuk mengurusi persoalan yang dihadapi yang berarti membuat kondisi yang ideal.

Desa dalam organisasi pemerintahan yang terdiri dari berbagai perangkat daerah dan pimpinan pemerintahan sangat vital dalam proses pengawasan kewenangan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran desa sebagai kearifan lokal dalam sejarah telah berlangsung beberapa waktu sebelum wilayah Indonesia merdeka. Dahulu, desa merupakan suatu wilayah lokal sebagai pemerintahan pertama negara Indonesia, yang perkembangannya ada beberapa waktu sebelum negara Indonesia diperkenalkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat setempat menjadi hal yang paling diutamakan, sehingga segala urusan dalam pemerintahan desa seyogyanya haruslah sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak kepemimpinan di lingkup pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif. Adanya ruang bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa merupakan suatu kebutuhan dalam kerangka pemerintahan mayoritas yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Desa Sunggal Kanan yang terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa yang menerapkan pemerintahan partisipatif *(Participatory governance)* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Pemerintah desa selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal kepartisipasian mereka dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa. Kendatipun demikian, menurut informasi yang disampaikan oleh kepala desa Sunggal Kanan bahwa tidak sedikit pula ditemukan masyarakat yang masih saja enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di desa Sunggal Kanan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Hj.Sitti Nurfatimah Rahman berjudul Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, menemukan bahwa Pelaksanaan Musrenbang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong sudah memperlihatkan dampak yang cukup di beberapa wilayah. Selanjutnya penelitian dari Akram Setiadi berjudul *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, menemukan bahwa *Participatory governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba masih belum terlaksana secara optimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan manajemen pemerintahan sementara penelitian ini menggunakan pendekatan politik pemerintahan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Memahami, menganalisis dan mendeskripsikan, bagaimana pelaksanaan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang serta Mendeskripsikan apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan hubungan antara peran pemerintah desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Penulis mengumpulkan data melaui wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari kepala Desa Sunggal Kanan, sekretaris Desa, kepala Dusun, beserta 10 orang masyarakat, yang dimana 5 orang merupakan tokoh masyarakat dan 5 orang lainnya bukan tokoh masyarakat (masyarakat biasa). Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang pada intinya adalah interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpula data selama proses penelitian. Analisa data dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana penerapan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan serta menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penulis ingin mencari tahu apakah *participatory governance* telah berjalan dengan baik di Desa Sunggal Kanan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pelaksanaan *Participatory Governance* Dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan pendapat dari 10 orang responden yang telah penulis wawancarai terdapat 5 orang responden yang sama sekali tidak pernah diundang dan tidak mengetahui kapan dilaksanakannya musyawarah desa. Sementara 5 responden lain menyampaikan bahwa mereka mengetahui adanya musyawarah desa dan juga pernah diundang dalam musyawarah desa yang dimana musyawarah tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Penulis meneliti mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara responden tersebut. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan ialah perdedaan pendapat tersebut terjadi dikarenakan perbedaan status sosial yang dimiliki oleh responden. Lima orang responden yag mengetahui dan pernah diundang dalam musyawarah desa merupakan tokoh masyarakat, sementara 5 responden yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah diundang dalam musyawarah desa bukanlah merupakan tokoh masyarakat.

Hal tersebut penulis korelasikan dengan pendapat dari pihak pemerintah Desa Sunggal Kanan yang menyatakan bahwa pemerintah desa sangat memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berperan dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut dilakukan pihak pemerintah desa dengan cara mengundang para tokoh masyarakat dalam musyawarah terkait kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah desa khususnya kebijakan mengenai pembangunan desa. Berdasarkan pendapat dari pihak pemerintah desa memang yang diundang dalam musyawarah desa tidaklah semua masyarakat, melainkan hanya tokoh masyarakat saja. Hal ini yang menurut penulis menjadi alasan mengapa 5 orang respon yang bukan tokoh masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang musyawarah desa, hal itu dikarenakan pemerintah desa memang tidak mengundang mereka untuk ikut musyawarah karena bukan merupakan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh informasi bahwa bahwa pelaksanaan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan cukup baik, dikarenakan pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maka akan menghasilkan suatu kebijakan partisipatif yang dimana kebijakan tersebut akan benar-benar sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan pendapat dari pihak pemerintah desa dan juga masyarakat, mengisyaratkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1.) Faktor Kepemimpinan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi bahwa faktor kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. *Leadership* yang dimiliki kepala desa harus ditunjang dengan kemampuan memimpin sebagai modal dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan pembangunan desa, khususnya yang memerlukan penggerakan massa. Gaya kepemimpinan kharismatik dan sifat keteladanannya yang patut dicontoh masyarakat, sehingga ajakannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi sangat cepat direspon oleh masyarakatnya. Pendekatan-pendekatan kekeluargaan yang diterapkan kepala desa mampu mendorong partisipasi masyarakat termasuk juga dalam hal ini adanya keterbukaan serta memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan instansi atau kantor desa

2.) Faktor Aktivitas Masyarakat

Aktivitas masyarakat termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi patisipasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Hal ini dikarenakan cukup banyak masyarakat yang memiliki alasan untuk tidak ikut serta dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa dikarenakan kesibukan yang dimiliki, pada umumnya adalah kesibukan mencari nafkah.

3.) Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam hal ini cukup identik dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi pengetahuan terlihat adanya kesadaran dan pemahaman terhadap program pembangunan. Konsekuensinya tingkat partisipasi masyarakat juga akan tinggi, dengan demikian untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

4.) Faktor Sikap dan Kepribadian Masyarakat

Sikap dan kepribadian masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat menanggapi program pembangunan yang akan direncanakan merupakan aspek yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat prioritas sehingga mereka merasa bertanggungjawab terhadap program pembangunan yang ada.

5.) Faktor Status Ekonomi

Status ekonomi yang tinggi maupun status ekonomi rendah tidak terlalu menonjol pengaruhnya, sebagaimana terlihat pada umumnya masyarakat yang status ekonominya terbilang baik terkadang partisipasinya dalam pembangunan khususnya keterlibatan secara fisik cukup rendah.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan cukup baik, dikarenakan pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maka akan menghasilkan suatu kebijakan partisipatif yang dimana kebijakan tersebut akan benar-benar sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

a. Penulis menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di desa Sunggal Kanan, yakni faktor Kepemimpinan, faktor Kesibukan masyarakat, faktor Pendidikan, faktor sikap dan kepribadian masyarakat, faktor status ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Desa Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan cukup baik, dikarenakan pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan dengan cara mengundang para tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maka akan menghasilkan suatu kebijakan partisipatif yang dimana kebijakan tersebut akan benar-benar sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Dan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa, yaitu faktor kepemimpinan, faktor Kesibukan masyarakat, faktor Pendidikan, faktor sikap dan kepribadian masyarakat, faktor status ekonomi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *participatory governance* dalam proses perumusan kebijakan pembangunan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Sunggal Kanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Global forum on reinventing government building trust in government. 2006. *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens.* America: United Nations Publication.

Rahman,S.N. 2016. *Perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa*. Makassar: UNHAS.

Setiada Akram. 2017. *Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Makassar: UNISMUH